



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

| | | |
|------------------|---|--|
| Rapat ke | : | 11 (<i>sebelas</i>) |
| Tahun Sidang | : | 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : | IV |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia (Persero) |
| Hari, Tanggal | : | Senin, 29 Juni 2020 |
| Pukul | : | 14.00 WIB |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Pimpinan Rapat | : | Gde Sumajaya Linggih, S.E., M.A.P., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : | Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 |
| A c a r a | : | Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun Anggaran 2020 |
| Hadir | : | 1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat; 3. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, beserta jajarannya. |

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 29 Juni 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui pencairan hutang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.5.757.945.000.000-** (*Lima Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) yang berupa penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan Pemerintah.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menjalankan rencana strategi inisiatif perusahaan untuk menanggulangi dampak Covid-19 kepada perusahaan, yaitu :
 - a) Melakukan efisiensi biaya operasional;
 - b) Memastikan ketersediaan dan stok pupuk subsidi sesuai alokasi Pemerintah.
 - c) Menjaga kualitas dan kuantitas stok pupuk di gudang, distributor dan kios serta terus memonitor kebutuhan petani di lapangan; dan
 - d) Memaksimalkan *shipping out* (*zero stock* di Gudang Lini I/Pabrik) antisipasi kendala logistik jika ada *lockdown* untuk menjamin ketersediaan pupuk di wilayah pemasaran.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui pencairan hutang Pemerintah ke Perum Bulog Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.566.364.976.056-** (*Lima Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI akan membahas terkait Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun 2017 – 2019 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Tahun 2018 – 2020 kepada Perum Bulog pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI sekaligus Komisi VI DPR RI juga akan meminta kepada Pemerintah agar pembayaran kewajibannya dapat dilakukan dalam setiap tahun anggaran karena menyangkut langsung dengan sistem ketahanan pangan nasional.
5. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah untuk mendukung pembiayaan Cadangan Beras Pemerintah di Perum Bulog yang selanjutnya akan dibicarakan pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.57 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.
A-327